

TELAAH KRITIS: Standar Pemeriksaan Keuangan Negara SK KETUA BPK No.1/2008

Pengembangan infrastruktur akuntansi sector public di Indonesia, telah semakin mengarah. Kondisi ini perlu disambut dengan baik dengan berbagai usulan yang mengarah ke kualitas. Kualitas adalah peranan implementasi infrastruktur tersebut dalam percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Sehingga, dalam konteks SPKN, Kualita SPKN ditentukan dengan peranan standar audit pemerintahan dalam perbaikan metode dan hasil program-program pemerintahan dan kemasayarakatan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Tulisan ini adalah hasil kerjasama antara pembimbing penelitian dan mahasiswa penelitian level paska sarjana –Magister Akuntansi UGM. Hasilnya dapat dipandang luar biasa. Tulisan ini juga merupakan telaah perundangan berbasis penelitian. Sehingga, apa yang dilakukan dalam persiapan buku ini dapat dijadikan model telaah perundangan public lainnya.

Sebagai patokan/arahan dari setiap tahapan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara bagi pemeriksa, SPKN menjadi sangat penting keberadaannya didalam menciptakan akuntabilitas public. SPKN tidak hanya menjadi penguat otoritas BPK sebagai organisasi pemeriksa namun hendaknya juga mendorong meningkatnya profesionalisme pemeriksa.

